



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Juni 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.15.WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran 2022; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.
Hadir Anggota	: ..... dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajarannya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pada hari ini adalah membahas pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan dan RKP Tahun Anggaran 2022.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami Pagu Indikatif TA 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, sebagai berikut:

*Dalam Ribu Rupiah*

KEMENTERIAN	PAGU INDIKATIF TA 2022
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	3.102.388.046

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 fokus kepada output prioritas Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 3 Juni 2021

**MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,**

**ABDUL HALIM ISKANDAR**

**KETUA RAPAT,**

**LASARUS**